PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Basuki Rakhmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358)321746 Faks (0358) 321111
www.nganjukkab.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT. atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2022 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKJiP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten NganjukTahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/ kegagalan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran , masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Nganjuk, Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawabserta berorientasi kepada hasil (*result oriented governement*), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LKJiP .Informasi dalam dokumen LKJiP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjukmerumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan sasaran :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan.
5. Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian seperti dalam tabel berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah;

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3,23 (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja **sangat tinggi** dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215)	3,2244 (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja **sangat tinggi** dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215)	100%

Sasaran 2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentaserumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat (ada 4 Tahapan : 1. Pengajuan draf rangcangan peraturan Bupati 2. Harmonisasi dan sinkronisasi di bagian hukum yang melibatkan pemrakarsa hukum dan PD terkait 3. Pengajuan	Sudah 3 tahapan	75%

	fasilitasi dan ijin tanda tangan 4. Penyempurnaan, penetapan dan pengundangan		
Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	-1 SK SK Bupati tentang Pemberian Ijin kepada PMI kab Nganjuk untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat dalam rangka Bulan Dana PMI tahun 2022 dan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI kab Nganjuk tahun 2022 -1SK SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI KabNganjuk tahun 2022	-1 SK SK Bupati tentang Pemberian Ijin kepada PMI kab Nganjuk untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat dalam rangka Bulan Dana PMI tahun 2022 dan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI kab Nganjuk tahun 2022 -1SK SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI KabNganjuk tahun 2022	100%

Sasaran 3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	181 Produk hukum	598 Produk hukum	302%

Sasaran 4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 SK (SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang)	1 SK (SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang)	100%

Sasaran 5. Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	600 paket	1492 paket	249%

Sasaran 6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%

Sasaran 7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	50 Perangkat Daerah	50 Perangkat Daerah	100%

Keseluruhan anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.57.608.609.910,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) telah terserap sebesar 87,09% atau sejumlah 50.172.857.010,-,(Lima Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah) yang selangkapnya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Melalui LKJiP Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untukmempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaiakuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan MenteriNegara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKJiP Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat Daerah bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022,serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja,Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) adalah :

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
b) Sebagai wujud pertanggung-jawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dasar Hukum

a) Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Gambaran Organisasi

Gambaran umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam penyelenggaraan Urusan Wajib dan otonomi daerah pelaksanaan sub urusan otonomi daerah dan pemerintahan umum dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas internal pemerintah daerah yang meliputi administrasi pemerintahan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas aparatur, dan peningkatan kualitas kebijakan publik serta melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Bagian Tata Pemerintahan
   - Subbagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
   - Subbagian Administrasi Kewilayahan
   - Subbagian Otonomi Daerah
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
   - Subbagian Bina Mental Spiritual
   - Subbagian Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat
3. Bagian Hukum
   - Subbagian Perundang-undangan
   - Subbagian Bantuan Hukum
   - Subbagian Dokumentasi Dan Informasi

C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

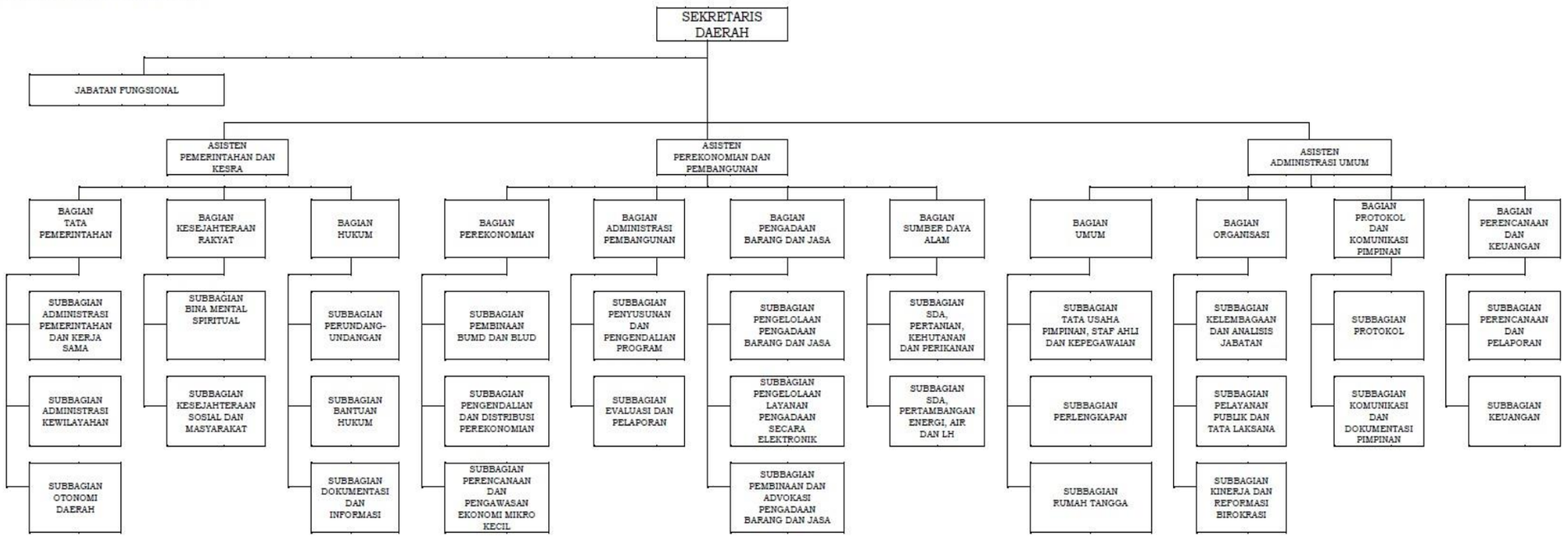
1. Bagian Perekonomian
   - Subbagian Pembinaan BUMD Dan BLUD
   - Subbagian Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian
   - Subbagian Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
2. Bagian Administrasi Pembangunan
   - Subbagian Penyusunan Dan Pengendalian Program
   - Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan
3. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
   - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
   - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
   - Subbagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
4. Bagian Sumber Daya Alam
   - Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan Dan Perikananan
   - Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan, Energi, Air Dan Lingkungan Hidup

D. Asisten Admnistrasi Umum

1. Bagian Umum
    - Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian
    - Subbagian Perlengkapan
    - Subbagian Rumah Tangga
2. Bagian Organisasi
    - Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
    - Subbagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
    - Subbagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
    - Subbagian Protokol
    - Subbagian Komunikasi Dan Dokumentasi pimpinan
    - Subbagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
4. Bagian Perencanaan Dan Keuangan
    - Subbagian Perencanaan Dan Pelaporan
    - Subbagian Keuangan

Struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN I.1
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
KABUPATEN NGANJUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 196607101992021001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut :

1. Agenda reformasi birokrasi yang mencakup 8 area perubahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, “mind set and culture” masih belum terlaksana
2. Akuntabilitas Kinerja yang perlu ditingkatkan lagi yang meliputi nilai ukur Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah, keselarasan antara perencanaan dengan program kegiatan yang ada, semakin baiknya, penyelarasan Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dengan Program Kegiatan yang ada

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Organisasi

Menelaah visi misi dan program Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi capaian visi misi Kepala Daerah tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kebupaten Nganjuk sejalan dengan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023.

Adapun rumusan visi kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah :

"*Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho*"

Visi tersebut memberikan makna bahwa kinerja pembangunan daerah yang ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik di sektor prioritas, yang secara langsung berdampak bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya visi tersebut memberikan makna bahwa pembangunan dimulai dari desa dengan membangun desa, dengan adanya desa yang maju diharapkan membawa dampak yang positif juga bagi bagi perekonomian yang maju, yang juga berdampak positif bagi kota dalam hal ini menata kota.

Menelaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan 6 misi yaitu :

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Dinamis Dan Harmonis, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman, Dan Ketertiban;
2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel (Accountable) Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan;

3. Meningkatkan Kualitas, Pelayanan Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Lokal Serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna;
5. Meningkatkan Kebanggaan Terhadap Kesenian, Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Yang Mampu Mendorong Pembangunan Sektor Pariwisata;
6. Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dan Perlindungan Dari Bencana.

Misi 1 : Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Dinamis Dan Harmonis, Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman, Dan Ketertiban

Bertujuan : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang harmonis, toleran, dan aman.

Sasaran yang Ingin dicapai :

1. Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius.

Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel (Accountable) Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan.

Bertujuan : Meningkatnya birokrasi pemerintah daerah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, dan bersih

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas, Pelayanan Dan Mutu Pendidikan Dan Kesehatan Untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Bertujuan : Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan

Misi 4 : Meningkatkan Keberpihakan Pemerintah Dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian Dan Potensi Lokal Serta Sektor Produktif Lain Berbasis Teknologi Tepat Guna

Bertujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah berbasis pertanian dan potensi lokal

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnyapertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani;
2. Meningkatnya Meningkatnya volume usaha sektor industri dan perdagangan;
3. Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat;
4. Meningkatnya iklim investasi

Misi 5 : Meningkatkan Kebanggaan Terhadap Kesenian, Kebudayaan Dan Kearifan Lokal Yang Mampu Mendorong Pembangunan Sektor Pariwisata.

Bertujuan : Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pariwisata dan sektor unggulan daerah yang didukung kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan seni budaya dan kearifan lokal.

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah;
2. Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.

Misi 6 : Infrastruktur Publik Yang Memadai Dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dan Perlindungan Dari Bencana

Bertujuan : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang handal, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

Sasaran yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal;
2. Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang Daerah;
3. Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
4. Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana.

Telaahan terhadap Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Sekretariat Daerah. Hal ini, terkait dengan pernyataan Misi ke 2 :

"Meningkatkan Kinerja Birokrasi Yang Bersih, Profesional Dan Akuntabel (Accountable) Demi Masyarakat Kabupaten Nganjuk Yang Efektif Dan Efisien Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Aspiratif, Partisipatif Dan Transparan"

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Pada misi ke 2 ini Sekretariat Daerah berperan dalam pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi yang ditandai dengan penguatan payung hukum berupa Road Map Reformasi dalam rangka mencapai tujuan :

1. **Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik**

   Sedangkan sasaran yang akan tercapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

   a) Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan inovatif
   b) Meningkatkan tata kelola keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) yang baik (transparansi, akuntabel, dan partisipatif)
   c) Mengembangkan sistem dan prosedur pengawasan yang profesional, proporsional dan berkeadilan
   d) Meningkatkan sinergitas kinerja eksekutif dan legislatif dalam penyaluran aspirasi masyarakat (hasil reses maupun hasil musrenbang) penyusunan kebijakan pembangunan dan produk hukum daerah

e) Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
f) Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (EGovernment)
g) Meningkatkan tata kelola kearsipan
h) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, inovasi
i) Mengembangkan sistem pelayanan yang inovatif, cepat, ramah, berkualitas, transparan (One Stop Service)

2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah

Sedangkan sasaran yang akan tercapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah adalah :

a) Meningkatkan kapasitas, kompetensi, kinerja dan kesejahteraan ASN melalui pemberian reward and punishment yang layak dan berkeadilan

Tabel 2.1

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3.23% (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1 Perbup
		Presentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	2 SK
3	Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Presentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	181 Produk hukum
4	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan	Presentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 SK
5	Meningkatnya Transparasi Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	600 paket
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai SAKIP ≥ Sangat Baik "BB"	34 PD

7	Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik	Presentase perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B "Baik"	50 PD

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan lndikator Kinerja Utama *(Key Performance Indicator),* yaitu ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunanmenyesuaikan dokumen renstra OPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalamsejumlah program dan kegiatan yang memilikikesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapanprogram diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasiansumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dariprogram. Rencana Kinerja Tahun 2022Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk, disusun mengacupada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2018-2023 denganmengambil target tahun 2022

Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 2022 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja terdiri dari 7 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.
2. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
3. Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas
4. Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan.

5. Meningkatnya kematangan organisasi pengadaan barang/ jasa
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
7. Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik

Berikut Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah	Peningkatan Nilai (score) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3.23% (Sangat Tinggi)
2	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%
		Presentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Presentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	100%
4	Meningkatnya Efektifitas Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi Pembangunan	Presentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%
5	Meningkatnya Transparasi Proses Pengadaan Barang/ Jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	100%

6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	Presentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Nilai SAKIP ≥ sangat Baik "BB"	60%
7	Meningkatkan Ketatalaksanaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Menuju Optimalisasi Pelayanan Publik	Presentase perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B "Baik"	100%

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan keseluruhan anggaran Sekretariat Daeah Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.57.608.609.910,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) telah terserap sebesar 87,09% atau sejumlah 50.172.857.010,-, (Lima Puluh Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sepuluh Rupiah) yang selangkapnya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokokdan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, rumus yang dipergunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat

katagori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75 % sampai 100 %	Baik
III	55 % sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55 %	Kurang

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut :

Pembahasan Realisasi Kinerja
Indikator Sasaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	%	3,23% (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja **sangat tinggi** dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215)	3,2244% (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja **sangat tinggi** dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215)	100%
2.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanj	%	1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat ada 4 Tahapan:	Sudah 3 tahapan	75%

	bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	uti		1. Pengajuan draf rangcangan peraturan Bupati 2. Harmonisasi dan sinkronisasi di bagian hukum yang melibatkan pemrakarsa hukum dan PD terkait 3. Pengajuan fasilitasi dan ijin tanda tangan 4. Penyempurnaan, penetapan dan pengundangan		
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%	-1 SK SK Bupati tentang Pemberian Ijin kepada PMI kab Nganjuk untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat	-1 SK SK Bupati tentang Pemberian Ijin kepada PMI kab Nganjuk untuk Menyelenggarakan Pengumpu	100%

				dalam rangka Bulan Dana PMI tahun 2022 dan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI kab Nganjuk tahun 2022 -1SK SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI KabNganjuk tahun 2022	lan Sumbanga n Dari Masyaraka t dalam rangka Bulan Dana PMI tahun 2022 dan tentang Pembentu kan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI kab Nganjuk tahun 2022 -1SK K tentang Pembentu kan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI KabNganju k tahun 2022	
3.	Meningkat nyaKepasti an Hukum melalui	Persentas e produk hukum yang tidak	%	181 Produk hukum	598 Produk hukum	302%

	Produk Hukum yang berkualitas	bertentangan dengan peraturan diatasnya				
4.	Meningkatnya efektifitas penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	1 SK (SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang)	1 SK (SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang)	100%
5.	Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa	Persentase Paket pengadaan yang dilelang melalui Bagian Pengadaan Barang / Jasa	%	600 paket	1492 paket	249%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	%	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	100%
7.	Meningkatnya	Persentase	%	50 Perangkat Daerah	49 Perangkat	98% (dikarenakan ada

	ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)			Daerah	PD yang tidak mencapai nilai IKM B yaitu RSD Nganjuk)

Analisa Target Realisasi Beserta Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kinerja

Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	253.584.600	160.294.079	63.21%
2.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	507.018.350	392.840.538	55%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	12.957.011.300	11.985.298.476	93%

3.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	958.527.800	454.802.990	37 %
4.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1.606.000.000	1.087.344.408	68%
5.	Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa	Persentase Paket pengadaan yang dilelang melalui Bagian Pengadaan Barang / Jasa	966.800.000	952.865.371	80%
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "B"	64.199.700	52.273.222	81.42 %
7.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	40.070.808.660	35.304.496.896	88%

Sesuai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023, terdapat satu tujuan, serta tujuh sasaran strategis, adapun analisa

dari lima sasaran strategis untuk mencapai tujuan dan misi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk diuraikan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi							
SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	%	100%	100%	-	-	-	-
Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	%	-	-	100%	3.23% (Sangat Tinggi)	3.23% (Sangat Tinggi)	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Target**				**Realisasi**			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %	-	-
	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	-	-	100 %	100 %	-	-	100 %	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja

Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Tingkat Kemajuan
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	100 %	-	-	Sudah Maksimal
	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	-	-	100 %	100 %	

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	253.584.600
		Total Anggaran	**253.584.600**

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2022

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi	3.23% (Sangat Tinggi)	3.23% (Sangat Tinggi)	100%	253.584.600	160.294.079	63.21%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100 %	63.21%	63.21%

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi							
SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	70 %	1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat (dengan 4 tahapan)	Sudah 3 tahapan	75%
Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100 %	2 SK	2 SK	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	70%	100 %	100 %	100 %	70%	75% (Sudah tahapan ke 3 dari 4 tahapan)
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Capaian kinerja pada Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti di tahun 2022 hanya 75% dikarenakan dalam 1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat
terdapat 4 Tahapan :

1) Pengajuan draf rangcangan peraturan Bupati
2) Harmonisasi dan sinkronisasi di bagian hukum yang melibatkan pemrakarsa hukum dan PD terkait
3) Pengajuan fasilitasi dan ijin tanda tangan
4) Penyempurnaan, penetapan dan pengundangan

Dan baru terselesaikan 3 tahapan pada tahun 2022, dan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Tingkat Kemajuan
		2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100%	100%	70%	75%	86% (Sudah tahapan ke 3 dari 4 tahapan)
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %	100 %	Sudah Maksimal

Capaian kinerja pada Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti di tahun 2022 hanya 86% dikarenakan pada tahun 2022 baru terselesaikan pada tahap ke 3 sedangkan dalam 1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat terdapat 4 Tahapan :

1) Pengajuan draf rangcangan peraturan Bupati
2) Harmonisasi dan sinkronisasi di bagian hukum yang melibatkan pemrakarsa hukum dan PD terkait
3) Pengajuan fasilitasi dan ijin tanda tangan
4) Penyempurnaan, penetapan dan pengundangan

Dan baru terselesaikan 3 tahapan pada tahun 2022, dan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	507.018.350
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat	12.957.011.300

		yang ditindaklanjuti	
		Total Anggaran	**13.464.029.650**

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat (dengan 4 tahapan)	Sudah 3 tahpan	75%	507.018.350	392.840.538	55%
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2 SK	2 SK	100%	12.957.011.300	11.985.298.476	93%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	75%	55%	73%
		Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	93%	93%

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi							
SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	%	100%	100%	132.3%	181 Produk hukum	598 Produk hukum	302%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	100%	100 %	132. 3%	100 %	100 %	100 %	132. 3%	302 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Realisasi Kinerja**				**Tingkat Kemajuan**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	100%	100%	132. 3%	302 %	158% (sangat maksimal)

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	958.527.800
Total Anggaran			**958.527.800**

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	181 Produk hukum	598 Produk hukum	302%	958.527.800	454.802.990	37 %

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	302%	37 %	13%

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi							
SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan							
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja			Tahun 2022		
		2019	2020	2021	Target	Realisasi	Capaian Kinerja

Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100 %	100 %	100 %	1 SK	1 SK	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Tingkat Kemajuan
		2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100 %	100% (Sudah maksimal)

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1.606.000.000
Total Anggaran			1.606.000.000

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 SK	1 SK	100 %	1.606.000.000	1.087.344.408	68%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100 %	68%	68%

SASARAN STRATEGIS 5 :

Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : **Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi**							
SASARAN STRATEGIS 5 : **Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.**							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	%	100%	100%	127%	600 paket	1492 paket	249%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022

Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	100 %	100 %	127 %	100 %	100 %	100 %	127 %	249 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Tingkat Kemajuan
		2019	2020	2021	2022	
Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	100%	100%	127%	249%	144% (sangat maksimal)

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	1.191.459.500
Total Anggaran			1.191.459.500

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian	600 paket	1492 paket	249%	966.800.000	952.865.371	80%

	pengadaan barang/ jasa						

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa.	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	249%	80%	32%

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : **Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi**							
SASARAN STRATEGIS 6 : **Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase nilai SAKIP OPD ≥ baik "B"	%	100%	100%	-	-	-	-
Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	**%**	-	-	100%	34 PD	34 PD	100%

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Target**				**Realisasi**			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ baik "B"	45%	50%	-	-	100 %	100 %	-	-
	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	-	-	55%	60%	-	-	100 %	100 %

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Realisasi Kinerja**				**Tingkat Kemajuan**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ baik "B"	100%	100%	-	-	100% (Sudah maksimal)
	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	-	-	100%	100%	

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	64.199.700
Total Anggaran			64.199.700

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	34 PD	34 PD	100%	64.199.700	52.273.222	81.42 %

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	100%	81.42 %	81.42 %

SASARAN STRATEGIS 7 :

Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik.

Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

TUJUAN 1 : **Peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi**							
SASARAN STRATEGIS 7 : **Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik**							
Indikator Kinerja	**Satuan**	**Capaian Kinerja 2019**	**Capaian Kinerja 2020**	**Capaian Kinerja 2021**	**Tahun 2022**		
					Target	**Realisasi**	**Capaian Kinerja**
Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	%	100%	100%	100%	50 PD	49 PD	98 % (dikarenakan ada PD yang tidak mencapai nilai IKM B yaitu RSD Nganjuk)

Tabel Perbandingan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Target**				**Realisasi**			
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 s/d 2022

Sasaran Kinerja	**Indikator Kinerja**	**Realisasi Kinerja**				**Tingkat Kemajuan**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	100%	100%	90%	98% (dikarenakan ada PD yang tidak mencapai	97% (Sudah maksimal)

					nilai IKM B yaitu RSD Nganjuk)	

Tabel Alokasi Per Sasaran Kinerja

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Anggaran Rp
1.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	40.070.808.660
Total Anggaran			40.070.808.660

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Kinerja	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	50 PD	49 PD	98 %	40.070.808.660	35.304.496.896	88%

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efiensi
1.	Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	98 %	88 %	89%

PENCAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	3.23% (Sangat Tinggi)	3.23% (Sangat Tinggi)	100%	253.584.600	160.294.079	63.21 %
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat (dengan 4 tahapan)	Sudah 3 tahpan	75%	507.018.350	392.840.538	55%
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	2 SK	2 SK	100%	12.957.011.300	11.985.298.476	93%
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	181 Produk hukum	598 Produk hukum	302%	958.527.800	454.802.990	37 %

Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	1 SK	1 SK	100%	1.606.000.000	1.087.344.408	68%
Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan barang/ jasa	600 paket	1492 paket	249%	966.800.000	952.865.371	80%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	34 PD	34 PD	100%	64.199.700	52.273.222	81.42 %
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	50 PD	49 PD	98 %	40.070.808.660	35.304.496.896	88%

Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran/ Program	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun LPPD dengan sangat baik	100%	63.21%	63.21%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	75%	55%	73%
	Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	100%	93%	93%
Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya	302%	37 %	13%
Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	68%	68 %
Meningkatnya Transparasi Proses Pengadaan Barang/	Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui bagian pengadaan	249%	80%	32%

Jasa	barang/ jasa			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"	100%	81.42 %	81.42%
Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik	Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B (baik)	98 %	88%	89%

Sedangkan Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK								
Capaian Kinerja Tribulan IV Tahun 2022 (Tanpa GU-NIHIL)								
Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)**		**Target Kinerja Tahunan**	**Target Kinerja Tribulan IV**	**Realisasi Kinerja Tribulan IV**	**Capaian Kinerja**	**Kendala Dalam Pencapaian Kinerja Tribulan IV**	**Upaya Mengatasi**
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
Administrasi tata pemerintahan								
Penataan Administrasi Pemerintahan	a	Jumlah kecamatan yang difasilitasi terkait tertib administrasi pemerintahan umum	10 kecamatan	2 kecamatan	2 kecamatan	100%	Pelaksanaan administrasi yang masih kurang optimal	Memaksimalkan koordinasi dengan kecamatan

	b	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan berkaitan dengan administrasi desa	10 desa	-	-	-	Hanya menangani masalah di kecamatan dan kelurahan	Akan disesuaikan di P APBD
	c	Jumlah laporan fasilitasi penyelesaian permasalahan dibidang pemerintahan umum	10 laporan	-	-	-	Belum ada laporan selanjutnya	Melakukan koordinasi selanjutnya
	d	Jumlah OPD hadapan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan di bidang perekonomian	12 Perangkat daerah	-	-	100%	Sudah dilaksanakan Tribulan I	Sudah dilaksanakan Tribulan I
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	a	Jumlah kecamatan yang melaksanakan PATEN dengan baik	20 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	100%	Pengisian indikator kurang sesuai dengan kondisi lapangan	Memaksimalkan koordinasi dengan kecamatan
	b	Jumlah kecamatan yang mengikuti kegiatan penilaian sinegirtas kecamatan	20 kecamatan	12 kecamatan	12 kecamatan	100%	Pengisian indikator kurang sesuai dengan kondisi lapangan	Memaksimalkan koordinasi dengan kecamatan

	c	Jumlah kerjasama antar daerah yang difasilitasi	6 kerjasama	9 kerjasama	9 kerjasama	333%	Format naskah kerja sama menyesuaikan Permendagri 22 Tahun 2020	Melakukan koordinasi dengan OPD pemrakarsa kerjasama
	d	Jumlah NPHD yang difasilitasi	35 naskah	-	-	-	Kewenangan PA	Akan disesuiakan di P-ABPD
	e	Jumlah penegasan batas desa yang dilaksanakan	19 Desa	-	-	-	Tidak Dianggarkan	Akan disesuiakan di P-ABPD
	f	Jumlah permasalahan fasilitasi dibidang pertanahan yang terdampak Pembangunan untuk kepentingan umum	12 permasalahan	-	-	-	Tupoksi ada di Dinas PRKPP	Akan disesuiakan di P-ABPD
	g	Jumlah persetujuan izin pelepasan tanah kas desa oleh Gubernur Jawa Timur	9 desa	-	-	-	Kewenangan ada di Dinas PMD	Akan disesuiakan di P-ABPD
Fasilitasi pelaksanaan otonomi	a	Jumlah dokumen LKPJ	1 Dokumen	-	-	100%	Sudah dilaksanakan Tribulan I	-

daerah	b	Jumlah perangkat daerah yang menyelesaikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tepat waktu	50 perangkat daerah	-	-	100%	Sudah dilaksanakan Tribulan I	-
	c	Jumlah perangkat daerah yang menyusun laporan SPM tepat watu	7 perangkat daerah	-	-	100%	Sudah dilaksanakan Tribulan I	-
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	a	Jumlah calon peserta MTQ Provinsi yang terbina	100 orang	100 orang	112 orang	102%	-	-
	b	Jumlah hufadz pembina calon penghafal Al Qur'an yang terfasilitasi	40 orang/12 bulan	40 orang/12 bulan	40 orang/12 bulan	100%	-	-
	c	Jumlah jamaah calon haji yang terfasilitasi dengan baik	800 orang	-800 orang	277 orang	35%	Karena ada pengurangan kuota jamaah haji dari Kementrian Agama Republik Indonesia (sudah terealisasi pada	Menyesuaikan kuota dan bekerjasama dengan kantor Kementrian Agama Kabupaten Nganjuk mulai pemberangkatan

							Tribulan II)	sampai dengan pemulangan jamaah haji
	d	Jumlah kegiatan semaan, khataman Al Qur'an yang terfasilitasi	96 kali	96 kali	35 kali	67,89%	-	-
	e	Jumlah pembinaan kerohanian dan kegiatan keagamaan yang terfasilitasi	10 kegiatan	6 kegiatan	2 kegiatan	40%	-	-
	f	Jumlah perayaan hari besar keagamaan yang terfasilitasi dengan baik	5 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	Sudah terealisasi di Tribulan II	-Sudah terealisasi di Tribulan II
	g	Jumlah peserta MTQ Kabupaten Nganjuk	500 orang	500 orang	0 orang	-	Adanya kekeliruan dalam penganggaran kas	-
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait	a	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan social	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	100%	-	-

Kesejahteraan Sosial	b	Jumlah pemberian bantuan hibah berupa uang untuk pembangunan tempat ibadah, ponpes, madin dan TPQ	23 lembaga	45 lembaga	44 lembaga	98%	-	-
	c	Jumlah pemberian hibah untuk insentif guru TPQ, guru sekolah minggu	1 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	100%	-	-
	d	Jumlah tempat ibadah, ponpes, madin, TPA/TPQ yang telah dimonitoring dan di evaluasi	81 lembaga	81 lembaga	81 lembaga	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	e	Jumlah insentif guru TPQ , guru sekolah minggu/ pembina iman yang telah dimonitoring dan dievaluasi	2 lembaga	2 lembaga	2 lembaga	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan	a	Jumlah koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat	1 rumusan	1 rumusan	1 rumusan	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II

Masyarakat								
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	a	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi	6 raperda	1 raperda	2 raperda	100%	Seluruh konsep raperda yang masuk ke bagian hukum sudah difasilitasi dan dilakukan harmonisasi	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah untuk percepatan proses harmonisasi di bagian hukum
	b	Jumlah rancangan produk hukum daerah yang telah difasilitasi	25 raperbup	4 raperbup	15 raperbup	100%	Seluruh konsep raperda yang masuk ke bagian hukum sudah difasilitasi dan dilakukan harmonisasi	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah untuk percepatan proses harmonisasi di bagian hukum

	c	Jumlah rancangan produk hukum yang telah difasilitasi	150 rakebup	37 rakepbup	280 rakepbup	100%	Seluruh konsep raperda yang masuk ke bagian hukum sudah difasilitasi dan dilakukan harmonisasi	Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah untuk percepatan proses harmonisasi di bagian hukum
Fasilitasi Bantuan Hukum	a	Jumlah bantuan hukum yang diberikan	3 perkara	1 perkara	1 perkara	100%	Tahun anggaran 2022 perkara litigasi yang masuk di bagian hukum sudah di fasilitasi dan diberikan yananan bantuan hukum	Mengoptimalkan koordinasi dengan perangkat daerah yang digugat agar memudahkan dalam penanganan perkara dipengadilan
	b	Jumlah pertimbangkan hukum yang diberikan	7 permasalahan	1 permasalahan	18 permasalahan	100%	Perangkat daerah kurang memahami peraturan teknis yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatannya	Meningkatnya pemahaman bagi perangkat daerah tentang pentingnya memahami peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tupoksi dan kegiatannya

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	a	Jumlah produk hukum daerah yang didokumentasikan	1 tahun	46 dokumen	297 dokumen	100%	Seluruh produk hukum kabupaten nganjuk sudag ditata dan didokumentasi serta disebarluaskan	Meningkatkan sosialisasi keberadaan dari JDIH (jaringan dokumentasi dan informasi hukum) bagian hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan	a	Jumlah BLUD yang Terbina	3 BUMD	3 BUMD	3 BUMD	100%	Dokumen Perda yang sampai saat ini belum ditetapkan masih menunggu jadwal fasilitasi dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur	Koordinasi dengan bagian hukum dan BUMD terkait

BLUD							Perbup tentang Direksi dan Komisaris BPR Anjuk Ladang Perseroda Kab. Nganjuk belum dibahas masih diproses di Bagian Hukum	Pembahasan selanjutnya untuk segera dilaksanakan agar Perbup cepat terselesaikan
							Review laporan untuk 3 BUMD belum bisa dilaksanakan anggaran yang belum tersedia	Review laporan hanya untuk 2 BUMD tahun 2023
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	a	Jumlah fasilitasi kredit usaha rakyat dan sistem informasi kredit program	22 UKM/IKM	60 UKM/IKM	60 UKM/IKM	100%	Fasilitasi sesuai anggaran kas telah dilaksanakan pada tribulan I sehingga untuk tribulan berikutnya dilanjutkan koordinasi dan monev pada UKM/IKM terfasilitasi	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan fasilitasi secara berkala terkait KUR dan SIKP terhadap pelaku UKM/IKM

	b	Jumlah OPD hadapan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan di bidang perekonomian	50 OPD/Kec	5 OPD	5 OPD	100%	Kurangnya koordinasi OPD hadapan, terkait pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022	Berkoordinasi dengan OPD hadapan dalam rangka pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
Pengendalian dan distribusi perekonomian	a	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi DBHCHT	11 OPD	-	-	-	Bagian perekonomian tidak mendapatkan alokasi pagu anggaran DBHCHT pada tahun 2022	Tidak dilaksanakan
	b	jumlah rekomendasi TPID yang ditindak lanjuti	30 OPD	30 OPD	30 OPD	100%	Kurangnya koordinasi dengan lintas sektoral dan OPD yang membidangi pengendalian inflasi	Perlu adanya sinergi yang lebih baik antara OPD terkait untuk lebih memaksimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	a	Jumlah PD teknis yang melakukan koordinasi dan yang berhubungan dengan pembangunan	30 OPD	30 OPD	30 OPD	100%	-	Dilaksanakan pada tribulan selanjutnya
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	a	Jumlah PD yang realisasi penyerapan anggarannya sesuai dengan aliran kas	30 OPD	30 OPD	30 OPD	100%	-	Dilaksanakan pada tribulan selanjutnya
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa								
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	a	Terlaksananya pemilihan penyedia barang/jasa melalui bagian pelayanan pengadaan	600 paket	30 paket	473 paket	249%	Capaian melebihi target dikarenakan adanya tambahan paket dari perubahan APBD	Akan menjadi perhatian kami untuk penyesuaian target kinerja pada tahun selanjutnya
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	a	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada OPD	50 OPD, 300 Orang	-	4 OPD, 38 Orang	100%	Anggaran digeser untuk pengembangan aplikasi vendor management system pada tribulan IV	-

Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam								
Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	a	Jumlah kelompok tani penerima bantuan pupuk bersubsidi yang difasilitasi	1282 Kelompok tani	1274 kelompok tani	1274 kelompok tani	99,37%	Fasilitasi telah diberikan kepada semua kelompok tani yang ada. Belum mencapai target tahunan karena tidak ada penambahan jumlah kelompok tani	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	a	Jumlah pelaku usaha bidang pertambangan dan lingkungan hidup yang difasilitasi	35 pelaku usaha/opd	13 pelaku usaha/opd	13 pelaku usaha/opd	85,71%	Semua perijinan terkait pertambangan diambilalih oleh pusat melalui OSS dan pemerintah daerah tidak terlibat di perijinannya	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	a	Jumlah pelaku usaha bidang energi dan air yang difasilitasi	50 pelaku usaha/opd	13 pelaku usaha/opd	13 pelaku usaha/opd	97,29%	Semua telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	a	Jumlah penyusunan rencana kerja perangkat daerah	5 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-
	b	Jumlah penyusunan renstra perangkat daerah						
	c	Jumlah penyusunan SAKIP perangkat daerah						
Koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	a	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	-	-

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	a	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-
Evaluasi kinerja perangkat daerah	a	Jumlah koordinasi evaluasi kinerja perangkat daerah	2 kali	2 kali	2 kali	100%	-	-
	b	Jumlah LPPD perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		
	c	Jumlah dokumen analis gender (PUG)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		
	d	Jumlah penyusunan dokumen evaluasi internal perangkat daerah	12 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%		
	e	Jumlah penyusunan LKJiP perangkat daerah	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		
Administrasi keuangan perangkat daerah								

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	a	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	150 ASN	129 ASN	129 ASN	100%	-	-
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	b	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	-	-
Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	c	Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-
Administrasi kepegawaian perangkat daerah								

Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	a	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang terselesaikan dengan baik	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	a	Jumlah senam kesegaran jasmani	12 kali	3 kali	3 kali	100%	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	a	Jumlah kain batik	45 buah	45 buah	45 buah	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	b	Jumlah kain petugas kegiatan khusus	25 buah	25 kali	25 kali	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	c	Jumlah PSL	11 stel	11 stel	11 stel	100%	Sudah terealisasi Tribulan III	Sudah terealisasi Tribulan III
	d	Pakaian PDH	2 stel	1 kali	1 kali	100%	-	-

	e	Pakaian batik	2 stel	1 stel	1 stel	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	f	Sepatu	2 pasang	1 pasang	1 pasang	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	a	Jumlah sistem informasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 paket	-	-	-	Tidak direalisasikan karena sudah ada program kepegawaian dari BKPSDM	Di pindahkan untuk kegiatan lain pada PAK tahun 2022
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	a	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kali	1 kali	1 kali	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
Pengadaan kendaraan dinas	a	Jumlah kendaraan dinas roda 2	6 unit	6 unit	6 unit	100%	Sudah Realisasi PAK	Sudah Realisasi PAK

operasional/lapangan								
Pengadaan mebel	a	Jumlah kursi rapat, almari pakaian, kursi pimpinan sandaran tinggi, kursi pimpinan sandaran pendek, meja kursi tamu ukir, meja tulis	6 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	-	-
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	a	Jumlah pengadaan printer tinta , komputer PC all in one, filling kabinet brother, AC split 2 pk, LCD projektor, AC split 1,5pk ,almari kayu jati, Filling kabinet kayu jati, Jam dinding, karpet, korden, laptop, televisi android, wireless speaker	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	-	-
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	a	Jumlah pengadaan, lemari es side by side, mesin pengering, vaccum cleaner, jet cleaner	5 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	-	-

lainnya								
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	a	Jumlah pengadaan AC split 2pk, kipas angin ceilling fan, karpet, korden, televisi android, spring bed , sarung bantal kursi, taplak meja bulat, taplak meja malam panjang	9 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	a	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 kali	3 kali	3 kali	100%	-	-
Penyediaan peralatan rumah tangga	a	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	8 jenis	2 jenis	2 Jenis	100%	-	-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	a	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 kali	3 kali	3 kali	100%	-	-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	a	Jumlah penyediaan bahan bacaan perundang-undangan	9 Jenis	9 jenis	9 jenis	100%	-	-
Penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD	a	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	260 kali	80 kali	80 kali	100%	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	a	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat terfasilitasi dengan baik	10.000 surat	10.000 surat	10.000 surat	100%	-	-
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan	a	Jumlah penyediaan jaringan telekomunikasi	40 titik	-	-	-	Perawatan jaringan telepon dilakukan oleh Telkom tanpa biaya	Anggaran sebagian dialihkan untuk pembelian pakaian

berbasis elektronik pada SKPD								Korpri pada PAK 2022
	b	Jumlah perawatan jaringan internet	7 titik	-	-	-	Perawatan jaringan telepon dilakukan oleh Telkom tanpa biaya	Anggaran sebagian dialihkan untuk pembelian pakaian Korpri pada PAK 2022
	c	Jumlah perawatan sarana telekomunikasi	25 titik	5 titik	5 titik	100%	Perawatan jaringan telepon dilakukan oleh Telkom tanpa biaya	Anggaran sebagian dialihkan untuk pembelian pakaian Korpri pada PAK 2022
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	a	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik terfasilitasi dengan baik	12 kali	3 kali	3 kali	100%	-	-
Penyediaan bahan logistik	a	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	12 kali	4 kali	4 kali	100%	-	-

kantor	b	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	2724 orang	681 orang	681 orang	100%	-	-
	c	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat	144 kali	36 kali	36 kali	100%	-	-
	d	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	60 kali	15 kali	15 kali	100%	-	-
Fasilitasi kunjungan tamu	a	Jumlah penyediaan jasa akomodasi tamu Pemda	8 kali	1 kali	1 kali	100%	-	-
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah								
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	a	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor terfasilitasi dengan baik	12 kali	3 kali	3 kali	100%	-	-

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	a	Jumlah penyediaan kebersihan kantor terfasilitasi dengan baik	128 kali	34 kali	34 kali	100%	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	a	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara	4 unit	4 unit	4 unit	100%	-	-
Penyediaan jasa	a	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik	40 unit	40 unit	40 unit	100%	-	-

pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	b	Jumlah terlaksananya perizinan surat tanda kendaraan/pajak bermotor roda 4 dan roda 2	40 stnk/pajak	40 stnk/pajak	40 stnk/pajak	100%	-	-
Pemeliharaan mebel	a	Jumlah mebeleur yang terpelihara dengan baik	16 jenis	16 Jenis	16 Jenis	100%	-	-
Pemeliharaan peralatan mesin lainnya	a	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	-	-
Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	a	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	6 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	100%	-	-

Pemeliharaan /rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	a	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	-	-
Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
Penyedian gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	a	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang	2 orang	2 orang	100%	Kegiatan bersifat rutin	-
Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil	a	Jumlah atribut perlengkapan KDH dan WKDH	76 buah	15 buah	15 buah	100%	-	-
	b	Jumlah pakaian batik tradisional	6 pakaian	3 pakaian	3 pakaian	100%	-	-
	c	Jumlah pakaian dinas	30 buah	5 buah	5 buah	100%	-	-

Kepala Daerah		KDH/WKDH						
	d	jumlah PDU	2 stel	1 stel	1 stel	100%	Sudah terealisasi Tribulan III	- Sudah terealisasi Tribulan III
	e	Jumlah pakaian korpri	2 stel	1 stel	1 stel	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	f	Jumlah pakaian olahraga	4 buah	2 buah	2 buah	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	g	jumlah PDH	4 stel	1 stel	1 stel	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	h	Jumlah PDL	2 stel	5 buah	5 buah	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	i	Jumlah kelengkapan KDH/ WKDH	5 buah	2 buah	2 buah	100%	Sudah terealisasi Tribulan II	Sudah terealisasi Tribulan II
	j	Jumlah PSL	2 stel	-	-	-	-	-
	k	Jumlah sepatu	8 pasang	1 pasang	1 pasang	100%	-	-
Penataan Organisasi								

Koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	a	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Kurangnya komitmen perangkat daerah baik kepala perangkat daerah dan jajaran terhadap pelaksanaan SAKIP	Mintensifikasi fasilitasi dan bimbingan teknis pemahaman terhadap SAKIP
Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	a	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Kurangnya komitmen perangkat daerah baik kepala perangkat daerah dan jajaran terhadap pelaksanaan RB	Mintensifikasi fasilitasi dan bimbingan teknis pemahaman terhadap RB
Fasilitasi pelayanan publik dan tatalaksana	a	Jumlah laporan pembinaan dibidang ketatalaksanaan	5 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Banyaknya ketentuan/aturan yang tumpang tindih sehingga kesulitan dalam pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah	Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat

Monitong, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tatalaksana	a	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian dan kualitas pelayanan publik dan tata laksana	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Belum maksimalnya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Memaksimalkan sosialisasi secara masif tentang pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat
Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	a	Jumlah Perangkat daerah yang direview analis jabatan dan analis beban kerja	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	Kurangnya kapasitas SDM yang menangani Anjab ABK kurang serta kurangnya komitmen perangkat daerah dan jajaran terhadap pelaksanaan penyusunan Anjab ABK	Mintensifikasi fasilitasi dan bimbingan teknis pemahaman terhadap penyusunan Anjab dan ABK
Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan								

Fasilitasi keprotokolan	a	Jumlah fasilitasi keprotokolan kunjungan pejabat negara	200 kali	30 kali	30 kali	100%	kegiatan : memfasilitasi adanya kunjungan / tamu pejabat negara. Kendala 1 : kedatangan tamu pejabat negara yang tidak sesuai dengan rundown / jadwal	Berkoordinasi dengan pihak terkait/PIC untuk segera menyesuaikan jadwal
	b	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH	200 kali	30 kali	30 kali	100%	kegiatan : memfasilitasi adanya kunjungan / tamu pejabat negara. Kendala 1 : kedatangan tamu pejabat negara yang tidak sesuai dengan rundown / jadwal	Berkoordinasi dengan pihak terkait/PIC untuk segera menyesuaikan jadwal

	c	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	100 kali	25 kali	25 kali	100%	kegiatan : memfasilitasi adanya kunjungan / tamu pejabat negara. Kendala 1 : kedatangan tamu pejabat negara yang tidak sesuai dengan rundown / jadwal	Berkoordinasi dengan pihak terkait/PIC untuk segera menyesuaikan jadwal
Fasilitasi komunikasi pimpinan	a	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah lainnya	50 kali	10 kali	10 kali	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan

	b	Jumlah rapat-rapat koordinasi unsur Forkopimda	50 kali	10 kali	10 kali	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan
	c	Jumlah pembuatan press release	200 kali	50 kali	50 kali	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan

	d	Jumlah penyiapan dan penggandaan materi rapat	50 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan
	e	Jumlah penyebarluasan informasi KDH / WKDH	100 Kali	30 Kali	30 Kali	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan

	f	Jumlah penyiapan naskah sambutan	50 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100%	Kegiatan : mendokumentasian kegiatan KDH/WKDH Kendala : adanya tamu disekitar KDH/WKDH yang tidak berkepentingan dan menyulitkan pengambilan dokumentasi	Menghimbau tamu untuk menempati posisi yang telah diarahkan
Pendokumentasian tugas pimpinan	a	Jumlah dokumentasi kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	200 kali/tahun	50 kali/tahun	50 kali/tahun	100%	Kegiatan : meliputi kegiatan KDH/WKDH kendala : terbatas dan rusaknya beberapa komponen alat/ perangkat/ yang dimiliki/ digunakan	Mengusulkan pengadaan alat/ perangkat baru

	b	Jumlah fasilitasi peliputan media untuk kegiatan KDH/WKDH	100 kali/tahun	30 kali/tahun	30 kali/tahun	100%	Kegiatan : meliputi kegiatan KDH/WKDH kendala : terbatas dan rusaknya beberapa komponen alat/ perangkat/ yang dimiliki/ digunakan	Mengusulkan pengadaan alat/ perangkat baru
	c	Jumlah penyiapan notulen KDH/WKDH	40 kali/tahun	10 kali/tahun	10 kali/tahun	100%	Kegiatan : meliputi kegiatan KDH/WKDH kendala : terbatas dan rusaknya beberapa komponen alat/ perangkat/ yang dimiliki/ digunakan	Mengusulkan pengadaan alat/ perangkat baru

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk berdasar pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Review Atas Laporan Kinerja.

Dari Evaluasi Kinerja dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa :

1. Sasaran Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah dan otonomi daerah dengan indikator ***Peningkatan Nilai (skor) LPPD dengan kategori sangat tinggi***, dengan target 3,23 (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja sangat tinggi dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215) terealisasi 3,23 (nilai terakhir pada tahun 2018 yang dikeluarkan pada tahun 2020 dengan scor 3.2244 dengan status kinerja sangat tinggi dan scor LPPD tahun 2017 yaitu 3.1215) atau dengan capaian sebesar 100%.
2. Sasaran Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan indikator ***Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti*** sudah targetkan 1 Perbup dengan 4 tahapan terealisasi 3 tahapan atau dengan capaian sebesar 75%, berikut penjelasannya :

   Dalam 1 Perbup pelimpahan wewenang Bupati kepada camat terdapat 4 Tahapan yaitu:

   1) Pengajuan draf rangcangan peraturan Bupati
   2) Harmonisasi dan sinkronisasi di bagian hukum yang melibatkan pemrakarsa hukum dan PD terkait

3) Pengajuan fasilitasi dan ijin tanda tangan
4) Penyempurnaan, penetapan dan pengundangan

Pada tahun 2022 indikator Persentase rumusan kebijakan yang ditetapkan di bidang di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti sudah mencapai tahapan ke 3 pada tahun 2022, dan akan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya.

Sedangkan pada Indikator *Persentase rumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti* dengan target 1 SK teralisasi 1 SK atau dengan capaian sebesar 100%. Indikator ini terealisasikan pada tribulan I dan II berupa 1 SK Bupati tentang Pemberian Ijin kepada PMI kab Nganjuk untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat dalam rangka Bulan Dana PMI tahun 2022 dan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI kab Nganjuk tahun 2022 dan 1 SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Bulan Dana PMI Kab. Nganjuk tahun 2022.

3. Sasaran Meningkatnya Jaminan Kepastian Hukum Melalui Produk Hukum Yang Berkualitas dengan indikator ***Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya*** dengan target 181 Produk hukum terealisasi 598 Produk hukum atau dengan capaian sebesar 302%, target indikator akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
4. Sasaran Meningkatnya efektifitas Penyusunan kebijakan daerah di bidang ekonomi pembangunan dengan indikator ***Persentase rumusan kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti***, dengan target 1 SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang teralisasi 1 SK tentang Penetapan anggota komisaris dan anggota direksi PT BPR Anjuk Ladang atau dengan capaian sebesar 100%.
5. Sasaran Meningkatnya transparasi proses pengadaan barang jasa dengan indikator ***Persentase paket pengadaan yang dilelang melalui ULP*** dengan target 600 paket teralisasi 1492 paket atau dengan capaian sebesar 249%, target indikator akan disesuaikan pada tahun berikutnya.
6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator ***Persentase nilai SAKIP OPD ≥ sangat baik "BB"*** dengan target 34 PD teralisasi 34 PD atau dengan capaian sebesar 100%.

7. Sasaran Meningkatnya ketatalaksanaan pemerintah yang efektif dan efisien menuju optimalisasi pelayanan publik dengan indikator ***Persentase Perangkat daerah yang nilai IKM ≥ B "baik"*** dengan target 50 PD teralisasi 49 PD atau dengan capaian sebesar 98%, dikarenakan ada PD yang tidak mencapai nilai IKM ≥ B "baik" yaitu RSD Nganjuk dan untuk kedepan akan melakukan pembinaan IKM lebih intensif kepada semua Perangkat Daerah agar semua dapat nilai minimal ≥ B "baik".

Strategi pemecahan masalah :

1. Lebih meningkatkan Bimtek LPPD kepada seluruh Perangkat Daerah agar kualitas LPPD masing-masing Perangkat Daerah lebih baik lagi.
2. Lebih melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Fasilitasi Penetapan Perbup tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat.
3. Akan dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pada bagian Hukum agar bisa seimbang dengan tingkat realisasi capaian kinerjanya.
4. Untuk melakukan koordinasi yang lebih intesif kepada bagian Hukum terkait penetapan Perbup tentang tata cara seleksi Calon Komisaris dan Calon Anggota Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang.
5. Akan dilakukan penyesuaian target indikator kinerja pada bagian ULP agar bisa seimbang dengan tingkat realisasi capaian kinerjanya.
6. Lebih memaksimalkan Bimtek SAKIP pada seluruh perangkat daerah agar dapat meningkatkan pemahaman terkait SAKIP dan meningkatkan nilai SAKIP pada masing-masing perangkat daerah dan juga menambah anggaran pada Bimtek SAKIP agar lebih maksimal, dimana nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat mencapai minimal atau lebih besar dari sangat baik "BB" (≥ BB).
7. Untuk kedepannya akan meningkatkan pembinaan IKM lebih intensif kepada semua Perangkat Daerah agar semua perangkat daerah dapat nilai minimal ≥ B "baik"

4.2 SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang dilakukan agar kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk meningkat menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain :

a. menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya.
b. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
d. memberdayakan sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk secara menyeluruh,efektif, dan efesien;

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Sekretariat Daerah Tahun 2022 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan kami pada tahun mendatang.

Nganjuk, 16 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661227 198602 1 001